



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## **Semangat Kerja Turun, Pemkab Siapkan Rp2 Miliar Mobnas DPRD**

**MUKOMUKO** – Ada yang menarik dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko. Usai pemilu legislatif (Pileg) lalu, saat ini gedung wakil rakyat itu tampak sepi.

Semangat kerja anggota DPRD periode 2019-2024 itu jauh menurun, dibuktikan banyak anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat-rapat penting. Malah sekadar menampakan muka pun, tampaknya mereka sudah berat.

Berdasarkan pantauan RB di lapangan, sebagian besar dewan yang jarang masuk kantor adalah mereka yang sudah tidak terpilih lagi atau gagal pada Pileg 2024. Termasuk 2 unsur pimpinan DPRD Mukomuko.

Akibat hilangnya semangat kerja dewan, banyak agenda yang terhambat. Diantaranya rapat Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pansus Realisasi atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2023. "Ia memang ada 2 pansus yang tengah berjalan, memang saat ini anggota DPRD yang hadir sangat minim," kata Ketua Pansus RPJMD DPRD Mukomuko, Busra.

Busra mengakui dampak dari minimnya kehadiran dewan, kegiatan tidak bisa berjalan dengan lebih cepat seperti biasanya.

Adapun anggota DPRD yang hadir saat ini, karena merasa masih ada tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan, sesuai yang diamanatkan rakyat.

Adapun anggota Pansus RPJMD, selain Busra ada Tabrani, Mustadin, Safa'at, Maskur, Aceng Zakaria, Siswanto, Roni Pasla, Wisnu Hadi dan Novri Ardiantasari.

Sedangkan Pansus Realisasi Anggaran, Aceng Zakaria, Armansyah, ST, Suwarno, Antonius Dalle, Damsir, Suntoko, Ansori Hardios, Siswanto, M. Ali Saftaini dan Tabrani.

"Kalau semakin banyak orang semakin cepat kerjanya. Seperti sekarang, kami hanya dua hingga tiga orang yang hadir. Saya, Wisnu Hadi dan Tabrani. Pak Tabrani merangkap sebagai anggota Pansus lain, hingga dia harus kejar waktu," jelas Busra.

Ketua Komisi I DPRD Mukomuko, Armansyah, ST juga mengakui minimnya anggota dewan yang hadir dalam setiap agenda dewan. Bahkan saat rapat paripurna pimpinan yang hadir hanya satu.

Padahal tanggung jawab anggota dewan ini sampai Agustus mendatang. Atau berakhir setelah dilantikannya anggota DPRD hasil Pileg 2024.

Maka dari itu sebelum pelantikan DPRD periode 2024-2029, tugas dewan sebagai wakil rakyat harus tetap berjalan.

"Jangan rapat biasa, paripurna saja sulit cukup anggota, pimpinan dewan malah hanya satu yang hadir," tandas Busra.

Dibagian lain, Pemkab Mukomuko telah menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk pengadaan mobil dinas (Mobnas) baru tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2024-2029.

Ketua DPRD akan mendapat Mitsubishi Pajero, sedangkan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD yaitu Toyota Fortuner.

Pengadaan mobnas baru unsur pimpinan dewan ini dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH. Seluruh anggaran pembelian mobil dinas itu telah disediakan di APBD tahun 2024.

"Sekitar akhir bulan Juli ini kemungkinan mobil sudah kita beli. Sekarang kami sedang melakukan survei harga ke perusahaan Mitsubishi dan Toyota. Kalau jumlah mobil yang kita beli hanya ada 3 unit," katanya.

Eva menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mukomuko membeli mobil dinas untuk unsur pimpinan dewan yang baru bertujuan memperlancar tugas dan fungsi pimpinan dewan.

Karena mobilitas unsur pimpinan dewan sangat tinggi. Bukan hanya turun langsung ke tengah-tengah Masyarakat, mereka juga banyak menghadiri undangan penting dari pemerintah daerah di luar Kabupaten Mukomuko.

"Pemerintah daerah sangat menginginkan tugas mereka lancar. Jangan sampai gara-gara mobil dinas tidak layak pakai, mengakibatkan tugas mereka terhambat. Selain itu, pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas keselamatan mereka selama di jalan raya," jelasnya.

Sedangkan 3 unit mobil dinas yang dipakai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko saat ini, akan ditarik Pemkab Mukomuko.

Mengenai nanti akan diperuntukkan OPD mana saja, Eva mengaku belum tahu. Kalaupun akan dipinjam pakaikan ke perangkat daerah lainnya tentu harus ada petunjuk atau persetujuan dari Bupati Mukomuko.

"Yang jelasnya, mobil dinas unsur pimpinan dewan yang lama itu nantinya akan ditarik dulu. Kalau nanti mau dipakaikan kepada siapa, saya juga belum tahu," demikian Eva. (pir)